**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

1. **Kajian Pustaka**

Pada bab kajian pustaka ini, ditemukan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan maslah-masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian.

1. **Audit**
2. **Pengertian Audit**

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) definisi auditing adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut Mulyadi (2013:9) definisi auditing secara umum adalah sebagai berikut :

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2014:2) definisi audit adalah sebagai berikut :

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person”.*

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Sedangkan Auditing menurut Messier, Clover dan Prawitt (2014:12) adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara sersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses pemeriksaan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif atas laporan keuangan dan catatan-catatan akuntansi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan.

1. **Tujuan Audit**

Menurut Alvin A. Arens (2012:104) berdasarkan seksi PSA 02 (SA 110) menyatakan:

“Tujuan umum audit atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya.

1. **Jenis-Jenis Audit**

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2012:16) mengemukakan bahwa:

“Akuntan publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit:

* 1. Audit operasional (*operational audit*)
  2. Audit ketaatan (*compliance audit*)
  3. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)”

Adapun penjelasan dari jenis-jenis audit menurut Arens et.al tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. **Audit Operasional (*Operational Audit*)**

Audit operasional merupakan pemeriksaan atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektiv dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada akhir audit operasional, manajemen buasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang.

* 1. **Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)**

Compliance Audit atau audit ketaatan merupakan pemeriksaan untuk menentukan apakah prosedur, aturan, atau, ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi telah diikuti oleh pihak yang diaudit. Berikut adalah contoh-contoh audit ketaatan untuk suatu perusahaan tertutup.

* Menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh pengawas perusahaan.
* Telaah tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum.
* Memeriksa perjanjian kontraktual dengan bankir dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati persyaratan-persyaratan hukum.
  1. **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsipprinsip akuntansi yang berlaku uuumum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukakn audit atas laporan kekuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menenetukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Sedangkan jenis-jenis audit menurut Amrizal Sutan Kayo (2013:43-45) ada empat jenis audit diantaranya audit umum keuanganadalah:

1. “Audit Umum Keuangan (*General Audit*)
2. Audit Operasional (*Management Audit*)
3. Audit Tujuan Tertentu (*Special Audit*)
4. Audit Forensik (*Forensic Audit*)”

Adapun penjelasan dari jenis-jenis audit menurut Amrizal Sutan Kayo tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Audit Umum Keuangan (*General Audit*)**

Adalah suatu reviu independen yang terutama ditujukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan yang telah disajikan oleh manajemen. Audit ini lazimnya dilakukan oleh pemeriksa yang berasal dariluar organisasi yang bersangkutan dan dilaksanakan tidak terperinci. Audit ini harus dilakukan sesuai dengan SPAP dan auditor memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang telah diaudit tersebut. Laporan hasil audit keuangan memuat pendapat atau opini auditor.

1. **Audit Operasional (*Management Audit*)**

Audit operasional atau pemeriksaan pengelolaan (management audit) adalah suatu pemeriksaan yang independen, sistematis, selektif dan analitis untuk menilai bagaimana cara pengelolaan atau operasi suatu organisasi diatur dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu semua peringkat manajemen dan pelaksanaan tugas yang lebih baik dengan memberikan infomasi kelemahan yang dijumpai berikut usul-usul rekomendasi perbaikannya. Audit ini ditekankan pada evaluasi terhadap penggunaan sember daya dan dana apakah sudah dilakukan secara hemat, efisien dan efektif.

1. **Audit Tujuan Tertentu (*Special Audit*)**

Audit kepatuhan berhubungan dengan kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan kebijakan, peraturan, atau undang-undang yang telah ditentukan sebelumnya. Audit dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Audit ini bersifat; eksaminasi, reviu, atau prosedur yang telah disepakati lebih dahulu.

1. **Audit Forensik (*Forensic Audit*)**

Kadangkala audit forensik disebut juga akuntansi forensik. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat dipertahankan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif. Menurut Hopwood(2008), “akuntansi forensik adalah penerapan keahlian investigasi dan analisis untuk tujuan memecahkan berbagai masalah financial sesuai dengan ketentuan lembaga pengadilan”. Sementara itu The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan forensic accounting tersebut lebih banyak menggunakan ilmu auditing yang secara spesifik dan bertujuan untuk litigasi.

1. **Jenis-Jenis Auditor**

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2012:19) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu:

1. “Auditor Independen (Akuntan Publik)
2. Auditor Pemerintah
3. Auditor Pajak
4. Auditor Internal (Internal Auditor)”

Adapun penjelasan dari jenis-jenis auditor menurut Arens et.al tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Auditor Independen (Akuntan Publik)**

Audit independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akauntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

1. **Auditor Pemerintah**

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserakhkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya.

1. **Auditor Pajak**

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

1. **Auditor Internal (*Internal Auditor*)**

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adnya independensi. Ketiadaan independensi ini merupapkan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.

1. **Audit Internal**
2. **Pengertian Audit Internal**

Menurut Hiro Tugiman (2011:11) definisi audit internal adalah sebagai berikut :

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:136) audit internal adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah, jaminan independen objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, membantu organisasi dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola”.

Pengertian audit internal menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) dalam Sukrisno Agoes (2013:204) sebagai berikut:

“*internal auditing is independent, objective assurance and consuling activity designed to add value And improve an organization’s operations. It helps an Organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disipliner approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes*”.

“Audit internal adalah penjaminan yang independen, objektif dan serta jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan terjadwal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses, pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, dan pengelolaan pengendalian”.

Sedangkan pengertian audit internal menurut menurut Hery (2017:238) adalah:

“Audit internal adalah suatu fungsi penelitian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penelitian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanan pada manajemen.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu proses yang sistematis terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi untuk menguji dan mengevaluasi bukti-bukti atau informasi untuk menilai dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kepada pihak yang bersangkutan.

1. **Pengertian Auditor Internal**

Auditor internal menurut Mulyadi (2011:28) adalah sebagai berikut :

“Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiataan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian perusahaan.”

Menurut Islahzzuman (2012:190) definisi auditor internal adalah sebagai berikut:

“Auditor yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk mengaudit bagi kepentingan direksi dan atau komisaris.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditor internal merupakan seseorang yang bekerja di suatu perusahaan yang menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan merupakan kepentingan direksi atau komisaris.

1. **Tujuan Audit Internal**

Pada umumnya, tujuan dilakukannya audit internal dalam suatu perusahaan adalah untuk membantu seluruh anggota organisasi khususnya pihak manajemen dalam menganalisis dan mengawasi tanggungjawab masing-masing anggota, apakah telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Alfred F. Kaunang (2013:5), terdapat 2 (dua) tujuan atau sasaran dilakukannya aktivitas audit internal, yaitu:

1. “Penilaian yang independen dan rekomendasi kepada manajemen.
2. Melayani kepentingan manajemen”.

Penjelasan lebih dalam terkait dua hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran atau tujuan secara menyeluruh dari *internal audit department* (departemen audit internal) adalah memberikan penilaian yang independen (tidak memihak) atas catatan-catatan akuntansi, keuangan, dan segala aktivitas di dalam suatu perusahaan atau grup dari perusahaan dan memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penilaian tersebut kepada manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan.
2. Memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa tugas *internal audit department* (departemen audit internal) adalah untuk melayani kepentingan manajemen. Dalam memberikan pelayanan kepada manajemen tersebut, audit internal dituntut untuk:
   1. Lengkap dan berkualitas dalam menyajikan informasi kepada manajemen.
   2. Produktif dalam membuat dan memberikan rekomendasi/laporan atas berbagai macam kegiatan/operasional dan keuangan.
   3. Menjadi perpanjangan tangan manajemen dalam hal pengawasan (*control*).

Menurut Sukrisno Agoes (2013:205) tujuan audit internal menyatakan bahwa:

“Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan.”

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh para auditor perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Menelaah dan menilai tentang memadai atau tidaknya suatu penerapan sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengelolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pimpinan dan dewan pengawas organisasi harus memahami dengan jelas tujuan dari pelaksanaan audit internal. Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai tujuan, tugas, dan tanggung jawab dari audit internal, maka akan mendorong mereka (pihak-pihak yang memiliki otorisasi tinggi) untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.

1. **Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal**

Seorang auditor internal haruslah mematuhi dan mentaati standar serta kode etik profesi audit internal, termasuk di dalamnya adalah mengenai ruang lingkup (scope) audit internal dalam suatu perusahaan. Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan internal, terdapat hal-hal yang perlu untuk diperhatikan serta ditaati oleh auditor internal, salah satunya adalah terkait dengan ruang lingkup kegiatan pemeriksaan audit internal, berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai ruang lingkup audit internal.

Mulyadi (2010:211) menyatakan bahwa :

“Fungsi audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor intern menyediakan jasa tersebut. Audit intern berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi.”

Menurut Hiro Tugiman (2011:44) aktitas-aktifitas dalam ruang lingkup audit internal terdiri dari :

* 1. “Aktifitas kepatuhan, dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap prosedur, rencana,kebijakan dan prinsip akuntansi yang telah di tetapkan oleh manajemen dan terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
  2. Aktifitas pengujian dilakukan untuk menguji kendala data-data yang disajikan atau dihasilkan oleh tiap-tiap bagian perusahaan yang meliputi pengujian terhadap pengamanan harta perusahaan dari kemungkinan kegiatan.
  3. Aktifitas penilaian sangat erat kaitannya dengan kelayakan dan aktifitas pengendalian intern perusahaan”.

Menurut Alfred F. Kaunang (2013:6) Ruang Lingkup Aktivitas Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. “Penilaian yang bebas atas semua aktivitas di dalam perusahaan (induk dan anak perusahaan). Dapat menggunakan semua catatan yang ada dalam perusahaan atau grup perusahaan dan memberikan advice kepada pimpinan perusahaann, baik direktur utama maupun direksi lainnya.
2. Me-*review* dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
3. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehinngga dapat terhindar dari pencurian, dan kehilangan.
5. Memastikan dapat dipercayanya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.
6. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oelh pemegang saham.
7. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah, dan saran atau solusi yang harus diberikan.
8. Bekerja sama dengan eksternal auditor sehubungan dengan penilaian atas pengendalian internal *(internal control).*”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup audit internal adalah meliputi penilaian atas pengendalian internal, penilaian atas pencatatan laporan perusahaan, serta penilaian atas hasil seluruh kegiatan perusahaan. Audit internal juga harus memberikan keyakinan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik.

1. **Peran Audit internal**

Mengingat pentingnya peran pengawasan terhadap tindak fraud, maka Audit Internal menjadi satu-satunya unit kerja yang paling tepat melakoninya. Karena itu, peran Audit Internal yang selama ini selalu berkaitan dengan urusan *physical control* harus sudah bergeser dari sekedar terkesan sebagai ”*provost*” perusahaan menjadi unit yang mampu berperan dalam pencegahan sekaligus pendeteksian *fraud.*

Menurut Valery G. Kumaat (2011:34), Audit Internal dituntut waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya fraud, yang mencakup:

* 1. “Identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya fraud.
  2. Penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian”.

Seandainya terjadi *fraud*, Audit Internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya *fraud* dalam berbagai segmen. Tidak hanya manajemen puncak, Audit Internal juga harus mendapat sumber daya yang memadai dalam rangka memenuhi misinya untuk mencegah *fraud*.

1. **Tanggungjawab dan Wewenang Audit Internal**

Pada dasarnya tanggung jawab audit internal adalah membantu anggota perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif melalui analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan peninjauan ulang atas informasi- informasi yang saling berhubungan. Kewenangan dan tanggung jawab auditor internal harus dinyatakan dengan dokumen tertulis yang formal dalam anggaran dasar organisasi dengan mendapat persetujuan dari manajemen senior.

Seperti yang dijelaskan The Institute Of Internal Auditors Florida (2017:39) tujuan, wewenang dan tanggung jawab auditor internal, yaitu:

*“The purpose, authority, and responsibility of the internal auditing department should be defined in formal written document (charter). The director should seek approval of the character by senior management as well as acceptance by board. The character should (a) establish the department’s position within the organization; (b) authorize access to access, personnel, physical properties relevant to performance of audits, (c) define the scope of internal auditing activities.”*

Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan, wewenang dan tanggung jawab tersebut harus didokumentasikan secara resmi dan tertulis atas persetujuan dari manajemen senior. Dokumen berisikan mengenai:

1. ”Keberadaan mengenai fungsi auditor internal dalam perusahaan,
2. Kewenangan melakukan hubungan dengan catatan dan dokumen, personil dan property perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi audit,
3. Ketentuan terhadap lingkup aktivitas audit”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:21) tanggung jawab auditor internal adalah :

“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.”

1. **Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal**

Perbedaan auditor internal dan eksternal menurut Hery (2017:240) adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Audit Internal** | **Audit Eksternal** |
| Dilakukan oleh auditor internal yang merupakan orang dalam perusahaan (pegawai perusahaan) | Dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) yang merupakan orang luar perusahaan. |
| Tujuan pemeriksaan adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. | Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan (klien). |
| Laporan auditor internal tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan audit mengenai bentuk penyimpangan, kecurangan, kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikan (rekomendasi). | Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa *management letter* yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern beserta saran  perbaikannya. |
| Pemeriksaan berpedoman pada *Internal Auditing Standards* yang ditentukan oleh *Institute of Internal Auditors*, atau pada Norma Pemeriksaan Internal yang ditentukan BPKP untuk pengawasan internal dalam lingkungan  BUMN/BUMD. | Pemeriksaan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonsia (IAPI). |
| Pemeriksaan internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun, karena auditor internal mempunyai waktu yang lebih banyak diperusahaannya. | Pemeriksaan eksternal dilakukan secara acak (*sampling*), mengingat terbatasnya waktu *audit fee*. |
| Penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang *registered accountant*. | Pemeriksaan eksternal dipimpin oleh (penanggung jawabnya adalah)  seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register. |
| Tidak memerlukan *client representation letter.* | Sebelum menyerahkan laporannya,  auditor eksternal terlebih dahulu harus meminta *client representation letter.* |
| Auditor internal tertarik pada kesalahan- kesalahan yang material maupun yang tidak material. | Auditor eksternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material,  yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. |

1. **Aktivitas Audit Internal**

Menurut Hery (2017:239) aktivitas audit internal pada dasarnya dapat digolongkan kedalam dua macam bentuk yaitu *financial Auditing* dan *operational Auditing* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Financial Auditing.*

“Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Tugas-tugas ini dapat dilaksanakan tanpa suatu evaluasi yang memerlukan penelitian lebih mendalam dan hasil audit ini diukur dengan tolak ukur yang mudah, yaitu “benar” atau “salah”. Dengan kata lain, audit keungan berusaha untuk memverfikasi adanya aset dan untuk memperoleh kepastian bahwa terhadap aset itu telah diadakan pengamanan yang tepat. Di samping itu yang lebih penting lagi adalah bahwa keserasian dari sistem pembukaan serta pembuatan laporan akan diperiksa dalam financial auditing ini.

1. *Operational Auditing.*

pemeriksaan lebih ditujukan pada bidang operasional untuk dapat memberikan untuk dapat memberikanrekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya. Pada perkembangan fungsi (peran) audit internal saat ini, auditor internal sepertinya sedikit mengurangi kegiatan pemeriksaan dalam bidang keuangan, dan lebih banyak perhatiannya diberikan pada kegiatan pemeriksaan operasional. Namun intinya adalah bahwa pemerikasaan operasional ini meliputi perluasan dari pemeriksaan intrn pada semua operasi perusahaan, dan tidak membatasi diri pada bidang keuangan dan akuntansi semata, oleh karena aktivitas keuangan dan akuntansi berhubungan erat dengan hampir semua aktivitas yang berlangsung dalam perusahaan.”

1. **Peningkatan Kemampuan Staf Audit Internal**

Kemampuan seorang auditor perlu untuk selalu ditingkatkan/dikembangkan, mengingat suatu aktivitas pemeriksaan atau audit sangat menuntut bagi seorang auditor agar selalu memiliki kemampuan yang selalu meningkat, dengan kata lain mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat serta kemajuan teknologi dan informasi yang tidak pernah berhenti berkembang. Pembahasan lebih lanjut mengenai peningkatan kemampuan auditor adalah sebagai berikut :

Menurut Alfred (2013, 16), bahwa terdapat 4 (empat) hal terkait dengan peningkatan kemampuan (*capabilities improvement*) auditor internal, antara lain:

* 1. *“Internal audit department* (departemen audit internal) harus bertanggung jawab untuk harus meningkatkan kemampuan tentang pengetahuan dan praktik-praktik internal audit dan bagian lain yang ada hubungannya dengan dunia bisnis secara umum dan perkembangan/perubahan yang dibutuhkan atas program kerja dan teknik pelaksanaan pekerjaan.
  2. Perpustakaan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan “*Internal Auditing*” harus ada di *internal audit department*. Buku-buku tersebut terdiri dari buku *general auditing, accounting, industrial accounting, marketing, quality management*, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan fungsi pembelian, produksi, periklanan, dan lain-lain.
  3. *Training* akan mendorong untuk meningkatkan kemampuan staf audit.
  4. *Best practices* dengan perusahaan-perusahaan di dalam maupun luar negeri”.

1. **Standar Profesional Audit Internal**

Menurut Hiro Tugiman (2011:16) Standar Profesional Audit Internal meliputi :

1. “Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen bagian audit internal”.

Adapun penjelasan dari keempat standar profesional Audit Internal tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Independensi**

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit. Dalam melaksanakan kegiatannya auditor internal harus bertindak secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan adanya independensi dan objektivitas, pelaksanaan audit internal dapat dijalankan dengan efektif dan hasil audit akan objektif, seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2011; 20) adalah sebagai berikut:

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Independensi dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektifitas, berikut dijelaskan lebih lanjut mengenai status organisasi dan sikap objektif yaitu:

* 1. Status Organisasi, status organisasi audit internal harus memadai sehingga memungkinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan.
  2. Objektivitas, Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif.

1. **Kemampuan Profesional**

Seorang auditor internal harus mencerminkan keahlian dan kemampuan professional. Kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman (2011: 27) adalah :

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Menurut Hiro Tugiman (2011: 16) kemampuan profesional auditor internal meliputi :

1. “Unit Audit Internal
   1. Personalia : harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan
   2. Pengawasan : unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal di awasi dengan baik.
2. Auditor Internal
   1. Kesesuaian dengan standar profesi : pemeriksa internal harus mematuhi standar profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan
   2. Pengetahuan dan kecakapan : pemeriksa internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan
   3. Hubungan antar manusia berkelanjutan : pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif
   4. Pendidikan berkelanjutan: pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan
   5. Ketelitian profesional : pemeriksa internal harus bertindak dengan ketelitian profesional yang seharusnya”.

Jadi bagian audit internal haruslah memiliki pengetahuan dan keahlian yang penting bagi pelaksanaan praktik profesi di dalam organisasi yang mencakup sifat-sifat kemampuan dalam menerapkan standar pemeriksaan, prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan.

1. **Lingkup Pekerjaan**

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan (Hiro Tugiman, 2011: 41) yang mengandung arti bahwa :

* + 1. “Keandalan informasi : pemeriksa internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi.
    2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati.
    3. Perlindungan terhadap harta : Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian atau kehilangan
    4. Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien : pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
    5. Pencapaian tujuan : pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta memberi rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi”.

Jadi di dalam ruang lingkup audit internal, auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan berjalan efektif serta efesien sesuai dengan yang telah disepakati.

1. **Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan**

Pelaksanaan pemeriksaan audit yang telah di dukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi para pelaksana pemeriksa. Empat langkah kerja Pelaksanaan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2011: 18) yaitu :

* + 1. “Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
    2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.
    3. Penyampaian hasil pemeriksaan, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
    4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit.

1. **Manajemen Bagian Audit Internal**

Dalam manajemen audit internal seorang pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat, menurut Hiro Tugiman (2011:19) meliputi :

* + 1. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab : pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal dengan jelas.
    2. Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal
    3. Kebijakan dan prosedur : Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.
    4. Manajemen personel : Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
    5. Pengendalian mutu : Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal

1. **Tahap Pelaksanaan Audit Internal**

Pelaksanaan pemeriksaan audit yang telah di dukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi para pelaksana pemeriksa. Empat langkah kerja pelaksanaan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2011: 18) yaitu :

* 1. “Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
  2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.
  3. Penyampaian hasil pemeriksaan, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
  4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit”.

1. **Pengendalian Internal**
2. **Pengertian Pengendalian Internal**

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan memerlukan pengendalian intern yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Dalam *Executive Summary* yang dikeluarkan oleh *COSO* (2013:3) pada bulan Mei 2013 mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

*“internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, design to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”*

Dapat diartikan pengertian pengendalian internal menurut *COSO* tersebut yaitu pengendalian internal adalah sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan terkait operasional, pelaporan, dan kepatuhan terhadap aturan.

Menurut Romney yang dialihbahasakan oleh Kikin Sakinah Nur Safira (2015:226) bahwa pengendalian internal adalah :

“Pengendalian internal (*internal control*) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas manajemen.”

Definisi pengendalian internal menurut *American Istitute of Certified Public Accounting* (*AICPA*) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:12) sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen, atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal berikut ini: (a) Keandalan pelaporan keuangan (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Dapat ditarik kesimpulan dari definisi beberapa ahli bahwa pengendalian internal adalah sistem, prosedur, proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan pegawai lainnya yang saling berhubungan dan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

1. **Tujuan Pengendalian Internal**

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan oleh pemilik perusahaan. Suatu pengendalian yang efektif dan efesien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan diharapkan dapat meminimalisasikan kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi serta mencegah terjadinya penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:341) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

* 1. “Reliabilitas pelaporan keuangan, tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
  2. Efisiensi dan efektivitas operasi, memperoleh informasi keuangan dan nun keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
  3. Ketaatan pada hukum dan peraturan, mematuhi ketentuan hukum, organisasi-organisasi publik, nun publik, dan nirlaba yang diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan”.

Amin Widjaja Tunggal (2016:12), menyatakan tujuan pengendalian internal adalah untuk:

1. “Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi, dan
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan beberapa tujuan tersebut dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain untuk mencapai suatu tujuan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern pada hakekatnya adalah untuk melindungi harta milik perusahaan, mendorong kecermatan dan kehandalan data pelaporan akuntansi, meningkatkan efektivitas dan efesiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

1. **Komponen Pengendalian Internal**

Pengendalian internal memiliki unsur-unsur yang mewakili apa yang diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan dan memiliki suatu hubungan langsung antar tujuan-tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Untuk menciptakan suatu pengendalian internal harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. *COSO* (2013:4) dalam *Internal Control-Intergrated Framework* (*ICIF*) terdapat lima komponen pengendalian intern yaitu sebagai berikut:

1. *“Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
2. *Risk Assesment* (Penilaian Risiko)
3. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)
4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)
5. *Monitoring Activities* (Aktivitas Pemantauan)”

Untuk lebih jelasnya berikut ini dijabarkan kelima komponen pengendalian internal tersebut:

* + 1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk displin dan struktur. Dalam *COSO* (2013:4) menjelaskan mengenai pemahaman lingkungan pengendalian sebagai berikut:

*“The control environment is the set of standards, processes, and structures that provide the basis for carrying out internal across the organization. The board of directors and senior management establish the tone at the top regarding the importance of internal control including expected standards of conduct. Management reinforces expectations at the various levels of the organization. The control environment comprises the integrity and ethical values of the organization: the parameters enabling the board of directors to carry out its governance oversight responsibility; the process for attracting, developing, and retaining competent individuals; and the rigor around performance measures, incentives, and rewards to drive accountability for performance.”*

Berdasarkan rumusan *COSO* di atas, dijelaskan bahwa lingkungan pengendalian adalah sekumpulan standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar pelaksanaa pengendalian internal di dalam organisasi. Dewan direksi dan manajemen senior memberikan teladan dan arahan terkait pentingnya pengendalian internal termasuk standar perilaku. Lingkungan pengendalian terdiri dari nilai etika dan integritas dari organisasi; parameter yang memungkinkan dewan direksi melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas jalannya organisasi; struktur organisasi dan penetapan wewenang dan tanggung jawab; proses menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang kompeten, ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan.

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas pada sistem secara keseluruhan pengendalian internal. Selanjutnya, *COSO* (2013:7) menyatakan, bahwa terdapat 5 (lima) prinsip yang harus dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian, yaitu:

* + 1. *The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values.*
    2. *The boards of directors demonstrates independence from management and of exercises oversight the development and performance of internal control.*
    3. *Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, and appropriate authorites and responsibilites in the pursuit of objectives.*
    4. *The organization demonstrates a commitment to attract, develop, an retain competent individuals in alignment with objectives.*
    5. *The organization holds individuals accountable for their internal control responsibilities in the pursuit of objectives.*

Memperhatikan rumusan *COSO* di atas, maka lingkungan pengendalian dapat terwujud dengan baik apabila diterapkan lima prinsip dalam pelaksanaan pengendalian internal, yaitu :

* + 1. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap nilai etika dan integritas.
    2. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan fungsi pengawasan dalam pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal.
    3. Manajemen menetapkan struktur, jalur pelaporan, dan kewenangan dan tanggung jawab yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan.
    4. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu-individu yang kompeten sesuai tujuan.
    5. Setiap individu memahami peran dan tanggung jawab pengendalian internal masing-masing
    6. *Risk Assesment* (Penilaian Risiko)

*“Risk is defined as the possibility that event will occur and adversely affect the achievement of objectives. Risk assesment involves a dynamic and iterative process for identifying and assessing risk to the achievement of objectives, risks to the achievement of these objectives from acrouss the entity are considered relative to established risk tolerances. Thus, risk assessment from the basis for determining how risks will be managed. A precondition to risk assessment is the establishment of objectives, linked at different levels of the entity. Management specifies objectives within categories relating to operations, reporting, and compliance with sufficient clarity to be able to identify and analyze risks to those objectives. Management also considers the suitability of the objectives for the entity. Risk assessment also requires management to consider the impact of possible changes in the external environment and within its own business model that may render internal control ineffective.”*

Berdasarkan rumusan *COSO*, bahwa risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan pencapaian tujuan. Penilain risiko melibatkan sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dalam pencapaian tujuan. Penilaian risiko menjadi dasar dari pengelolaan risiko itu sendiri. Tahap awal dari penilaian risiko adalah penetapan tujuan, dihubungkan dengan berbagai level di dalam organisasi. Manajemen menentukan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan, dan kepatuhan secara jelas dan mencukupi agar risiko setiap tujuan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisa. Manajemen juga harus mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan entitas. Dalam penilaian risiko, manajemen harus mempertimbangkan pengaruh dari kemungkinan adanya perubahan pada lingkungan eksternal dan model bisnis internal yang mungkin menyebabkan ketidakefektifan pada pengendalian internal.

Prinsip-prinsip dalam penilaian risiko menurut *COSO* (2013:7) sebagai berikut:

1. *The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the identification and assessment of risk relating to objectives.*
2. *The organization identifies risk to the achievement of its objectives across the entity and analyzes risk as a basis for determining how the risks should be managed.*
3. *The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the achievement of objectives.*
4. *The organization identifies and assesses changesthat could significantly impact the system of internal control.*

Berdasarkan rumusan *COSO*, terdapat 4 (empat) prinsip yang mendukung penilaian risiko dalam organisasi yaitu:

* + 1. Organisasi menentukan tujuan dengan jelas agar identifikasi dan penilaian risiko masing-masing tujuan dapat dilakukan.
    2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
    3. Organisasi harus mempertimbangkan kemungkinan adanya fraud dalam penilaian risiko.
    4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai adanya perubahan yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal.
    5. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)

*“Control activities are the actions established through policies and procedures that help ensure that management’s directives to mitigate risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are performed at all levels of the entity, at various stages within business processes, and over the technology environment. They may be preventive or detective in nature and may encompass a range of manual and automated activities such as authorizations and approvals, verifications, reconciliations, and business performance reviews. Segregation of duties is typically built into the selection and development of control activities. Where segregation of duties is not practical, management selects and develops alternative control activities.”*

Berdasarkan rumusan *COSO*, bahwa aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diambil melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan dari manajemen untuk mitigasi risiko pencapaian tujuan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian dilaksanakan pada semua tahap proses bisnis pada seluruh level organisasi dengan memanfaatkan teknologi. Kegiatan pengendalian bisa bersifat pencegahan maupun pendeteksian dan terdiri dari kegiatan manual maupun otomatis seperti otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi dan tinjauan kinerja bisnis. Jika pemisahan tugas tidak begitu jelas, manajemen bisa memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan pengendalian.

*COSO* (2013:7) menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian, yaitu sebagai berikut:

* + 1. *The organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels.*
    2. *The organization selects and develops general control activities over technology to support the achievement of objectives.*
    3. *The organization deploys control activities through policies that establish what is expected and procedures that put policies into action.*

Berdasarkan rumusan *COSO* di atas, bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian dalam organisasi yaitu:

* + 1. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian tujuan sampai pada tingkat yang dapat diterima.
    2. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian secara umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.
    3. Organisasi mengimplementasikan dan menjalankan aktivitas pengendalian sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan.
    4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)

*COSO* (2013:5) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi (*Information and Communication*) dalam pengendalian internal sebagai berikut:

*“Information is necessary for the entity to carry out internal control responsibilities to support the achievement of its objectives. Management obtains or generates and uses relevant and quality information from both internal and external sources to support the functioning of other components of internal control. Communication is the countinual, interative process of providing, sharing, and obtainingnecessary information. Internal communication is the means by which information is disseminated throughout the organization, flowing up, down, and across the entity. It enables personnel to receive a clear message from senior management that control responsibilities must be taken seriously. External communication is twofold: it enables inbound communication of relevant external information, and it provides information to external parties in response to requirements and expectations.”*

Sebagaimana yang dinyatakan oleh *COSO* di atas, bahwa entitas membutuhkan informasi dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan. Manajemen mengumpulkan, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas baik dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung fungsi dari komponen pengendalian internal lainnya. Komunikasi adalah proses menyediakan, berbagi, dan mengumpulkan informasi yang penting secara berkelanjutan dan berulang. Komunikasi internal adalah alat penyaluran informasi di dalam organisasi. Komunikasi internal memungkinkan personel untuk memperoleh pesan yang jelas dari manajemen bahwa tanggungjawab pengendalian harus dilaksanakan dengan serius. Komunikasi eksternal memungkinkan masuknya informasi eksternal serta memberikan informasi yang relevan pada pihak luar.

*COSO* (2013:7) selanjutnya menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu sebagai berikut:

* + 1. *The organization obtains or generates and uses relevant, quality information to support the functioning of internal control.*
    2. *The organization internally communicates information, including objectives and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning of internal control.*
    3. *The organization communicates with external parties regarding matters affecting the functioning of internal control.*

Berdasarkan rumusan *COSO* di atas, bahwa ada tiga prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu:

* + 1. Organisasi menghasilkan atau mendapatkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal.
    2. Organisasi mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal.
    3. Organisasi mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal.
    4. *Monitoring Activities* (aktivitas Pengawasan)

*COSO* (2013:5) menjelaskan mengenai aktivitas pengawasan (monitoring activities) dalam pengendalian internal sebagai berikut:

*“Ongoing evaluations, separate evaluations, or same combination of the two are used to ascertain whether each of the five components of internal control, including controls to effect the principles within each components, is present and fuctioning. Ongoing evaluations, built into business processes at different levels of the entity, provide timely information. Separate evaluations, conducted periodically, will vary in scope and frequency depending on assessment of risks, effectiveness of ongoing evaluations, and other management considerations. Findings are evaluated against criteria established by regulators, recognized standars-setting bodies or management and the board of directoras as appropriate. The two principles relating to Monitoring Activities are:*

* + 1. *The organization selected, develops, and performs ongoing and/or separate evaluations to ascertain whether the components of internal control are present and functioning.*
    2. *The organization evaluates and communicates internal control deficiencies in a timely manner to those parties responsible for taking corrective action, including senior management and the board of directors, as appropriate.*

Memperhatikan rumusan yang dikemukakan oleh *COSO* di atas, bahwa monitoring berkelanjutan, evaluasi terpisah, maupun kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing komponen pengendalian internal telah ada dan berfungsi. Monitoring berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam proses bisnis pada berbagai level di dalam entitas akan memberikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah, yang dilaksanakan secara berkala, akan mempunyai ruang lingkup dan frekuensi pelaksanaan yang bervariasi tergantung dari penilaian risiko, efektivitas dari monitoring berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan akan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan, prinsip umum. Kekurangan akan dikomunikasikan pada manajemen dan dewan direksi sesuai tingkatannya.

Dua prinsip yang berkaitan dengan aktivitas pemantauan adalah:

* + 1. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan monitoring berkelanjutan dan atau evaluasi terpisah untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah ada dan berfungsi.
    2. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengkoreksi secara sesuai dan tepat waktu, termasuk manajemen senior dan dewan direksi.

1. **Menilai Resiko Pengendalian Internal**

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:360) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan untuk menilai risiko pengendalian adalah:

* + 1. “Mengidentifikasi tujuan audit, hal ini dilakukan untuk untuk kelas-kelas transaksi dengan menerapkan tujuan audit khusus yang berhubungan dengan transaksi yang sudah dibahas sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk umum, bagi setiap jenis transaksi utama entitas bersangkutan.
    2. Mengidentifikasi pengendalian yang ada, auditor menggunakan informasi, yang telah dibahas pada bagian terdahulu mengenai Perolehan dan pendokumentasian pemahaman atas pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.
    3. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait, setiap pengendalian alam memenuhi satu atau lebih tujuan audit yang terkait.
    4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan, dan kelemahan yang material, auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah saji laporan keuangan.
    5. Menghubungkan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material dengan tujuan audit terkait, setiap defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit yang terkait.
    6. Menilai Riko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait, auditor menggunakan semua informasi yang telah dibahas sebelumnya untuk menilai risiko pengendalian yang subjektif bagi setiap tujuan.
    7. Komunikasi dengan pihak yang memikul tanggung jawab tata kelola, komunikasi ini biasanya ditujukan untuk komite audit dan manajemen.
    8. Surat manajemen, walaupun surat manajemen ini tidak disyaratkan oleh standar auditing, biasanya auditor menyiapkan surat ini sebagai jasa audit bernilai tambah”.

Sedangkan Hery (2016:148), menyatakan langkah-langkah menilai risiko pengendalian internal sebagai berikut:

* + 1. “Mengidentifikasi tujuan audit, hal ini dilakukan untuk jenis transaksi dengan menerapkan tujuan audit khusus yang berhubungan dengan transaksi.
    2. Mengidentifikasi pengendalian yang ada, auditor menggunakan informasi mengenai pemahamannya atas pengendalian internal klien untuk mengindentifikasi pengendalian yang berperan dalam mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.
    3. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit terukur, lewat bagian matriks pengendalian, terlihat bagaimana setiap pengendalian berperan dalam mencapai satu atau lebih tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.
    4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan, dan kelemahan yang material, auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah saji laporan keuangan.
    5. Menghubungkan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material dengan tujuan audit terkait, setiap defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit yang terkait.
    6. Menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait, auditor menggunakan semua informasi yang telah dibahas sebelumnya untuk menilai risiko pengendalian yang subjektif bagi setiap tujuan”.

1. **Pelaporan Pengendalian Internal**

Berdasarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang dikutip oleh Hery (2016:151) auditor diharuskan untuk menyusun laporan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan pengendalian internal berisi:

1. “Pendapat auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode pembukuan telah dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Pendapat auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan dalam dalam hal yang material pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan”.
3. **Kecurangan (*Fraud*)**
4. **Pengertian Kecurangan (*Fraud*)**

Kecurangaan (fraud) pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau orang atau manajemen organisasi suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menyebabkan pihak lain merasa dirugikan.

Amin Widjaja Tunggal (2016:1) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Kecurangan didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset”.

Menurut Johnstone et al (2014:34) pengertian kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut :

“*Fraud is an intentional act involving the use of deception that results in a material misstatement of the financial statement”.*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kecurangan adalah tindakan disengaja yang melibatkan pelaku penipuan yang menghasilkan bahan salah saji laporan keuangan.

*Association of Certified Fraud Examiner* (dalam Karyono, 2013:3) mengemukakan bahwa:

*“Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another* (Fraud berkenaan dengan kebohongan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur tipu daya, licik dan tidak jujur yang merugikan orang lain).”

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) memiliki arti suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu sehingga mengakibatkan orang lain/kelompok menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. **Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)**

*Pressure*

*Opportunity*

*Rationalizationon*

**Gambar 2.1**

**Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)**

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:4) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:

* 1. “*Pressure* (Tekanan)

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seorang berani melakukan tindakan kecurangan (fraud). Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja kurang atau pola hidup serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja. Seperti: lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan merasa diperlakukan secara adil, adanya proses penerimaan yang tidak fair.

* 1. *Opportunity* (Kesempatan)

Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu,yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang kurang memadai.

* 1. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Si pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan”.

1. **Klasifikasi Kecurangan (*fraud*)**

Menurut Examination Manual 2006 dari Association of Certified Fraud Examiner dalam Karyono (2013: 17-24), kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

* 1. “Kecurangan Laporan (*fraudulent statement*), yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (nonfinancial statem menyajikan laporan keuangan lebi baik dari sebenarnya dan lebih buruk dari sebenarnya.
  2. Penyalahgunaan Aset (*asset misappropriation*), yang terdiri atas kecurangan kas, dan kecurangan persediaan dan aset lain.
  3. Korupsi (*corruption*), terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuapan, hadiah tidak sah, dan pemerasan ekonomi. Pengertian korupsi bervarisi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan kelompok tertentu.
  4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer, dapat berupa menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukan data palsu”.

Menurut Siti dan Ely (2010:64) mengklasifikasikan kecurangan (fraud) ke dalam dua kelompok utama yaitu:

1. “Keurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Kecurangan ini mencakup tindakan seperti:
   * 1. Manipulasi, pemalsuan dan penggelapan data akuntansi dan dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
     2. Representasi yang salah atau hilangnya peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
     3. Penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja, berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Penyalahgunaan aset (*missapropriation of asset*) merupakan salah saji yang timbal dari pencurian aset entitas yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kecurangan ini mencakup tindakan:
   * 1. Penggelapan tanda terima barang/uang.
     2. Pencurian aset.
     3. Tindakan yang menyebabkan entitas harus membayar atas harga barang yang tidak diterima”.

Sedangkan menurut Reksojoedo (2013:31-33) kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindakan, akan tetapi secara umum dapat dibagi menjadi tiga bentuk tindakan, yaitu:

* 1. “Pencurian (*the act*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengambil aset milik orang atau pihak lain dengan tanpa ijin atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
  2. Penyembunyian (*concealment*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan benda, surat data, informasi, atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perubahan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
  3. Perubahan (*convertion*) adalah tindakan kecurangan yaang dilakukan dengan cara mengubah suatu benda, surat, data, informasi atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan”.

Segala bentuk kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta hak orang lain atau pihak lain. Kecurangan dalam apapun bentuknya akan berpotensi merugikan pengguna laporan keuangan, karena menyediakan informasi laporan yang tidak benar untuk membuat keputusan.

1. **Tanda-Tanda Adanya Kecurangan (*fraud*)**

Kecurangan dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau audit internal apabila jeli dalam melihat tanda-tanda kecurangan (*fraud*) tersebut. Deengan memahami tanda-tanda kecurangan (*fraud*), manajemen dapat mengidentifikasikan kondisi kecurangan (*fraud*) yang kemungkinan besar akan terjadi atau telah terjadi. Tanda-tanda kecurangan (*fraud*) seperti yang disebutkan oleh Amin Widjaja Tunggal (2011:61) antara lain :

* + 1. “Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya
    2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
    3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan
    4. Pengendalian operasi yang tidak baik
    5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan”

Menurut W. Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examinition* yang dikutip oleh Karyono (2013:95) ada enam jenis tanda-tanda *fraud* yaitu sebagai berikut:

1. “Keganjilan Akuntansi
2. Kelemahan Pengendalian Intern
3. Penyimpangan Analisis
4. Gaya Hidup Berlebihan
5. Kelakuan Tidak Biasa
6. Pengaduan”

Adapun penjelasan dari tanda-tanda *fraud* tersebut adalah sebagai berikut :

* + 1. Keganjilan Akuntansi

Keganjilan akuntansi (*accounting anomalies*) atau penyimpangan akuntansi karena adanya rekayasa dari pelaku, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya.

* + 1. Kelemahan Pengendalian Intern

Pengendalian internal antara lain dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi. Bila pengendalian intern tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi *fraud*.

* + 1. Penyimpangan Analisis

Memahami tanda-tanda *fraud* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis berupa:

* 1. Analisis vertikal adalah analisis hubungan antar item-item dalam laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi dan laporan arus kas) tahun lalu dengan tahun ini yang digambarkan dalam presentase.
  2. Analisis horizontal adalah analisis presentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
  3. Analisis rasio adalah perbandingan item-item dalam laporan keuangan seperti rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio lancar (*current ratio*).
  4. Analisis rendemen adalah perbandingan antara hasil barang jadi dengan bahan bakunya.
     1. Gaya Hidup Berlebihan

Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya niat melakukan tindakan *fraud*. Setelah *fraud* berhasil, gaya hidup pelaku berubah menjadi berlebihan (*extravagant lifestyle*). Hal ini terlihat dari hasil penelitian tertutup (secara diam-diam) diperoleh kenyataanbahwa pelaku ternyata:

* 1. Hidupnya sangat boros.
  2. Hidupnya konsumtif, suka membeli barang mewah dan monil mewah padahal penghasilan resminya tidak memungkinkan untuk belanja seperti itu. Oleh karena itu, gaya hidup berlebihan merupakan tanda adanya fraud yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti.
     1. Kelakuan Tidak Biasa

Kelakuan tidak biasa (*unusual behaviour*) atau perilaku menyimpang sebagai akibat rasa bersalah dan adanya rasatakut, sehingga kelakuan tidak biasa ini merupakan gejala terjadinya *fraud*.

* + 1. Pengaduan

Pengaduan (*tip or complain*) atau adanya keluhan atas kegiatan atau pelayanan oleh organisasi atau pegawai hanya dianggap sebagai gejala karena pengaduan tersebut belum tentu benar. Pihak ketiga yang mengadu mungkin untuk memperoleh kepentingan individu semata, sedangkan karyawan yang mengadu karena iri hati atau masalah pribadi lain.

1. **Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**
2. **Pengertian Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut Karyono (2013:47) pencegahan fraud adalah :

“Mencegah fraud merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud)*.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:59), pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah:

“Pencegahan kecurangan (*Fraud*) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah upaya terintergrasi untuk menangkal dan mempersempit ruang gerak pelaku serta mengidentifikasi kegiatan yang beresiko terjadinya kecurangan (*fraud*).

1. **Tujuan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Fraud merupakan masalah yang ada didalam lingkungan perusahaan, dan harus dicegah sedini mungkin. Pencegahan fraud yang efektif memiliki lima tujuan, menurut Diaz Priantara (2013:183) adalah sebagai berikut:

1. “*Prevention*
2. *Deterrence*
3. *Disruption*
4. *Identification*
5. *Civil action prosecution”*

Adapun penjelasan dari tujuan tersebut yaitu sebagai berikut :

* + 1. “*Prevention* : mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua lini organisasi.
    2. *Deterrence* : menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba karena pelaku potensial melihat sistem pengendalian risiko *fraud* efektif berjalan dan telah memberi sanksi tegas dan tuntas sehingga membantu jera (takut) pelaku potensial.
    3. *Disruption* : mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh mungkin
    4. *Identification* : mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
    5. *Civil action prosecution* : melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atau perbuatan curang kepada pelakunya.”

Selain itu, Amin Widjaja Tunggal (2012:33) memaparkan tujuan pencegahan kecurangan *(fraud)*, yaitu:

1. “Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu.
2. Proses rekrutmen yang jujur.
3. Pelatihan *fraud awareness.*
4. Lingkup kerja yang positif.
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati.
6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan.
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal.”

Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan kecurangan (*fraud)* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu Riset menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk mencegah *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud,* yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu mencipatkan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu antar sesama anggota organisasi atau perusahaan.

Keterbukaan antar anggota organisasi merupakan hal yang sangat pokok yang harus dimiliki setiap perusahaan dan berguna untuk perkembangan serta perilaku sumber daya manusia yang kompeten dan manajemen profesi yang efektif. Di samping adanya kejujuran dan keterbukaan, keberhasilan perusahaan dalam mencegah kecurangan tidak hanya ditentukan oleh hasil kerja individu, melainkan atas keberhasilan tim (kerja sama). Suatu organisasi dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh sekelompok orang yang membentuk atau menjadi anggota dalam organisasi, dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, orang-orang tersebut terkait dalam lingkungan masyarakat dan berarti mereka saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya.

1. Proses rekrutmen yang jujur

Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian yang positif, penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah. Hanya orang-orang yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan dipekerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang bertanggung jawab. Pengecekan latar belakang, verifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas selalu dilakukan. Selain itu, pelatihan secara rutin untuk seluruh pegawai mengenai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku pun harus selalu diterapkan. Dalam *review* kinerja, termasuk diantaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, selalu melakukan evalausi objektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku, serta setiap pelanggaran ditangani segera.

1. Pelatihan *fraud awareness*

Semua pegawai harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberitahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud* aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu, pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Pelatihan keterampilan dan pengembangan karir tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berikut merupakan serangkaian pelatihan yang perlu diperhatikan dan diterapkan pada setiap karyawan di perusahaan secara eksplisit agar dapat mengadopsi harapanharapan yang baik untuk perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

* + Kewajiban-kewajiban mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu yang dihadapi.
  + Membuat daftar jenis-jenis masalah.
  + Cara mengkomunikasikan masalah-masalah tersebut dan adanya kepastian dari manajemen mengenai harpan tersebut.

1. Lingkungan kerja yang positif

Dari beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka daripada karyawan diperlakukan tidak baik, seperti diperalat, diancam, atau diabaikan.

Pengakuan dan sistem penghargaan *(reward)* sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja, kesempatan yang sama bagi semua pegawai, program kompensasi secara profesional, pelatihan secara profesional, dan prioritas organisasi dalam pengembangan karir akan menciptakan tempat kerja yang nyaman dan positif. Tempat kerja yang nyaman dan positif dapat mendongkrak semangat kerja pegawai dan dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan tindakan curang terhadap perusahaan.

1. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan, dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa memberlakukan aturan perilaku dan kode etik di lingkungan pegawai. Dalam hal ini, harus dibuat kriteria yang termasuk perilaku jujur dan tidak jujur serta perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang. Semua kriteria ini dibuat secara tertulis dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan harus mereka setujui dengan membubuhkan tanda tangannya. Pelanggaran atas aturan perilaku kode etik harus dikenakan sanksi.

1. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan

Masalah ataupun kesulitan pasti akan dialami oleh setiap pegawai atau karyawan pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan berbagai macam kecurangan agar keluar dari masalah yang dihadapinya. Bentuk bantuan perusahaan seharusnya dapat diberikan agar dapat mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan terhadap keuangan perusahaan, serta menjadi dukungan dan solusi dalam menghadapi permasalahan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga meminimalisir kerugian perusahaan akibat kecurangan.

1. Tanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi

Strategi pencegahan kecurangan yang terakhir adalah menanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi. Pihak perusahaan, khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar menanamkan sanksi, yaitu dengan membuat dan menjalankan peraturan terhadap setiap tindak kecurangan sehingga perbuatan menyimpang dalam perusahaan dapat diminimalisir dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun sudah melakukan tindakan kecurangan.

Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang baik bersama-sama pada setiap anggota organisasi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan berkembang dan maju lebih baik, maka seluruh karyawan dalam perusahaan akan sejahtera. Jika seluruh karyawan sejahtera, maka mereka akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Jika seperti itu, maka moral dan etika maereka akan lebih baik

1. **Tata Kelola untuk Mencegah Kecurangan (*fraud*)**

*Fraud* merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin, Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan beberapa tata kelola untuk mencegah *fraud* diantaranya adalah sebagai berikut:

* + 1. “Budaya Jujur dan Etika yang Tinggi

Beberapa unsur menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi yaitu:

* 1. Menetapkan *tone at the top*

Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk menetapkan *“Tone at the Top”* terhadap perilaku etis dalam perusahaan. Kejujuran dan integrasi manajemen akan memperkuat integritas serta kejujuran karyawan di seluruh organisasi. *Tone at the Top* yang dilandasi kejujuran dan integritas akan menjadi dasar bagi kode etik perilaku yang lebih terinci, yang dapat dikembangkan untuk memberikan pedoman yang lebih khusus mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.

* 1. Menciptakan lingkungan kerja yang positif

Dari riset yang dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat karyawan yang dapat mengurangi kemungkinan karyawan melakukan *fraud* terhadap perusahaan.

* 1. Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat

Agar berhasil mencegah *fraud*, perusahaan yang dikelola dengan baik mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah, terutama yang akan menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting.

* 1. Pelatihan

Semua pegawai baru harus dilatih tentang ekspetasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus mengetahui tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud actual* atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu, pelatihan kewaspadaan terhadap fraud juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu.

* 1. Konfirmasi

Sebagian perusahaan mengharuskan pegawainya untuk secara periodik mengkonfirmasikan tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Pegawai diminta untuk menyatakan bahwa mereka memahami ekspektasi perusahaan serta sudah mematuhi kode perilaku dan mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran. Konfirmasi tersebut akan membantu mengkokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu menghalangi pegawai melakukan *fraud* atau pelanggaran etika lainnya.

* + 1. Tanggung Jawab Manajemen untuk Mengevaluasi Pencegahan *fraud*

*Fraud* tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukan dan menyembunyikan perbuatan itu. Manajemen bertangggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah *fraud,* mengambil langkahlangkah yang teridentifikasi untuk mencegah fraud, serta memantau pengendalian internal yang mencegah dan mengidentifikasi *fraud.*

* + 1. Pengawasan oleh Komite Audit

Komite audit mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Dalam memenuhi tanggung jawab ini komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses pencegahan *fraud* oleh manajemen dan program serta pengendalian anti *fraud*. Komite audit juga membantu menciptakan *“tone at the top”* yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku etis dengan mendukung toleransi nol manajemen terhadap *fraud.*”

1. **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dipaparkan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama penulis / Tahun** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan** |
| 1 | Suginam (2016) | Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan *Fraud* | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Audit Internal berpengaruh terhadap Pencegahan  *Fraud* | Penelitian sebelumnya hanya mengunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen |
| 2 | Kerza Laksana Muhammad Wahdi (2015) | Peranan Audit Internal dalam Upaya Pencegahan *Fraud* | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Audit Internal berpeengaruh dalam upaya Pencegahan  *Fraud* | Penelitian sebelumnya hanya mengunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen |
| 3 | Angriza Tamara Nissa (2015) | Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal, Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan audit internal, efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan | Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pengukuran dimensi nya dan mengganti variabel Y dengan pencegahan kecurangan |
| 4 | Suci Laeliyah (2017) | Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Pencegahan *Fraud* | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan pengendalian internal dan moralitas manajemen berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* | Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variable x2, pengukuran dimensinya, lokasi penelitian dan tahun data yang berbeda. |
| 5 | Fibrianti Suci Pratiwi (2016) | Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dan Dampaknya Pada Kinerja Perusahaan | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dan kinerja perusahaan. | Peneliti menambahkan variable audit internal dan Y2 yaitu kinerja perusahaa tidak digunakan pada penelitian ini. |

1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dan proses penelitian dimana kerangka pemikiran harus menerangkan, pemikiran intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel yang akan diteliti. Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian sebelumnya.

1. **Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Peran audit internal adalah sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan. Audit internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah fraud dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen. Keberadaan audit internal dalam sebuah organisasi bisnis merupakan alat kontrol yang baik terhadap kesalahan, penyimpangan dan kecurangan (Olowojalu Monisula (2013)).

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012;65) :

“audit internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi risiko fraud”.

Menurut (Suginam, 2016) peran audit internal dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko manajemen, pengendalian internal, dan komite audit yang mempunyai peran penting dalam berbagai aspek organisasi yang termasuk di dalamnya adalah pencegahan *fraud.*

Menurut penelitian yang dilakukan Theresa (2014) peran audit internal adalah sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wardhini (2010) menunjukkan bahwa semakin efektifnya peran audit internal, maka pencegahan kecurangan dapat dijalankan. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan apabila audit internal sudah mampu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud. Sebaliknya, ketika audit internal tidak mampu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud, maka kecurangan akan terjadi dan membuat kerugian bagi perusahaan.

1. **Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)**

Pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang), Valery G. Kumaat (2011:15)).

Karyono (2013:85) menjelaskan mengenai hubungan pengendalian internal dengan pencegahan fraud yaitu:

“tindakan utama untuk pencegahan fraud adalah menciptakan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang andal pada aktivitas organisasi. Selain masalah moral dan etika, kegagalan pencegahan fraud juga disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.”

Pernyataan hubungan pengendalian internal dengan pencegahan fraud juga ditegaskan oleh Monica (2012) dan Thoyibatun (2009) dalam Tiara Delfi, dkk (2014) yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik diperlukan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Selain itu, pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan perusahaan.

**Landasan Teori**

* Audit Internal : Hiro Tugiman (2011:11), Amin Widjaja Tunggal (2012:136), Sukrisno Agoes (2013:204), Hery (2017:238)
* Pengendalian Internal :*COSO* (2013:3), Kikin Sakinah Nur Safira (2015:226), Amin Widjaja Tunggal (2016:12)
* Pencegahan Kecurangan : Karyono (2013:47), Amin Widjaja Tunggal (2012:59)

**Data Penelitian**

1. Data penelitian dari auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Bandung
2. Kuesioner dari 50 responden
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan

**Referensi**

1. Lia Damayanti, (2016)
2. Andri Agustian Kartono (2015)
3. Rony Fransisco (2014)
4. Angriza Tamara Nissa (2015)
5. Diana Febriani (2017)
6. Fibrianti Suci Pratiwi (2016)

**Pencegahan Kecurangan**

**Audit Internal**

**Premis 1**

1. Olowojalu Monisula (2013)
2. Amin Widjaja Tunggal (2012;65)
3. (Suginam, 2016)
4. Theresa Fresty (2014)
5. Wardhini (2010)

**Hipotesis 1**

**Implementasi Pengendalian Internal**

**Pencegahan Kecurangan**

**Premis 2**

1. Valery G. Kumaat (2011:15)
2. Karyono (2013:85)
3. Tiara Delfi dkk (2014)

**Hipotesis 2**

**Premis 3**

1. Amin Widjaja Tunggal (2012;65)
2. Valery G. Kumaat (2011:15)

**Pencegahan Kecurangan**

**Audit Internal dan Implementasi Pengendalian Internal**

**Hipotesis 3**

**Analisis Data**

**Referensi**

1. Sugiyono (2015:5)
2. Moh, Nazir (2011:91)
3. Sambas Ali Muhidin (2011:28)
4. Singgih Santoso (2012:293)

**SPSS 20**

1. Analisis Deskritif : Mean
2. Analisis Varifikatif

* Uji Asumsi Klasik
* Analisis Regresi Linear Berganda
* Analisis Koefisien Korelasi
* Koefisien Determinasi

1. Uji Hipotesis

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**

1. **Hipotesis Penelitian**

Dantes (2012:164) menyatakan hipotesis sebagai praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian.

Sedangkan menurut Sugiyono (2015:93) adalah sebagai berikut:

“hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang lerevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1Y : Terdapat Pengaruh Audit internal Terhadap Pencegahan Kecurangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Bandung.

H2Y : Terdapat Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Bandung.

H1H2Y : Terdapat Pengaruh Audit Internal dan Implementasi Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Bandung.